



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR
38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kesepakatan rencana anggaran dan program sumber Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas Tahun 2025, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
31. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
32. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);
33. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 Nomor 1);

34. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.854.294.196.100,00 berkurang sejumlah Rp. (32.325.916.000,00) sehingga menjadi Rp.1.821.968.280.100,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.830.294.196.100,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (32.325.916.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.797.968.280.100,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.854.294.196.100,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (32.325.916.000,00)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.821.968.280.100,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (24.000.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 25.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp.25.000.000.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 24.000.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dengan lampiran Perubahan tercantum secara tersendiri yang merinci item perubahan pada Perangkat Daerah meliputi Dinas Sosial, Dinas Pangan, Dinas Komunikasi dan Informasi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Maret 2025 M
25 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Maret 2025 M
25 Ramadhan 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,


BAHRUL JAMIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025 NOMOR 5



KABUPATEN ACEH BESAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	197.677.700.000,00	197.677.700.000,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	126.547.602.550,00	126.547.602.550,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.479.602.550,00	31.479.602.550,00	0,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	20.800.000.000,00	20.800.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	10.679.602.550,00	10.679.602.550,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	44.240.000.000,00	44.240.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	39.700.000.000,00	39.700.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	28.399.200.000,00	28.399.200.000,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	23.408.200.000,00	23.408.200.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	820.000.000,00	820.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	298.200.000,00	298.200.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.991.000.000,00	3.991.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.976.000.000,00	1.976.000.000,00	0,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.230.897.450,00	36.230.897.450,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.656.435.450,00	5.656.435.450,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.656.435.450,00	5.656.435.450,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	187.800.000,00	187.800.000,00	0,00
4.1.04.13.01.0024	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	187.800.000,00	187.800.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.206.662.000,00	2.206.662.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	2.206.662.000,00	2.206.662.000,00	0,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.604.716.496.100,00	1.572.390.580.100,00	-32.325.916.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.571.652.854.000,00	1.539.326.938.000,00	-32.325.916.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	50.890.645.000,00	49.104.532.000,00	-1.786.113.000,00
4.2.01.03.03.0002	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	50.890.645.000,00	49.104.532.000,00	-1.786.113.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	422.529.527.000,00	422.529.527.000,00	0,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	422.529.527.000,00	422.529.527.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	22.883.896.000,00	22.883.896.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	3.725.352.000,00	3.725.352.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	8.733.788.000,00	8.733.788.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.611.140.000,00	3.611.140.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	466.546.000,00	466.546.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	341.275.000,00	341.275.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.114.516.000,00	3.114.516.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	14.991.000,00	14.991.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.775.553.000,00	1.775.553.000,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.100.735.000,00	1.100.735.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	821.340.165.000,00	794.091.504.000,00	-27.248.661.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	647.868.668.000,00	647.868.668.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	18.585.101.000,00	18.585.101.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	64.657.726.000,00	64.657.726.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	62.980.009.000,00	62.980.009.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	27.248.661.000,00	0,00	-27.248.661.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	254.008.621.000,00	250.717.479.000,00	-3.291.142.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	936.163.000,00	936.163.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	263.029.000,00	263.029.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	224.240.000,00	224.240.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	33.636.879.000,00	33.636.879.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.468.329.000,00	5.468.329.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0082	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	13.317.873.000,00	13.317.873.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	4.164.766.000,00	0,00	-4.164.766.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.404.594.000,00	45.404.594.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	94.638.908.000,00	94.638.908.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	397.500.000,00	397.500.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.449.966.000,00	3.449.966.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	269.886.000,00	269.886.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	11.739.996.000,00	11.739.996.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.207.417.000,00	6.207.417.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.184.100.000,00	2.184.100.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.620.796.000,00	9.620.796.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.633.179.000,00	19.633.179.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	0,00	873.624.000,00	873.624.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.063.642.100,00	33.063.642.100,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	33.063.642.100,00	33.063.642.100,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.468.642.100,00	14.468.642.100,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.900.000.000,00	27.900.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.900.000.000,00	27.900.000.000,00	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	27.900.000.000,00	27.900.000.000,00	0,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	27.900.000.000,00	27.900.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.830.294.196.100,00	1.797.968.280.100,00	-32.325.916.000,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.172.106.079.576,00	1.149.684.121.583,00	-22.421.957.993,00
5.1.01	Belanja Pegawai	658.134.950.816,00	658.134.950.816,00	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	492.874.119.083,00	492.895.980.779,00	21.861.696,00
5.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	316.539.430.076,57	313.507.662.736,57	-3.031.767.340,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.420.754.337,00	45.450.183.229,00	29.428.892,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.237.680.854,00	29.737.680.854,00	2.500.000.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.888.266.434,00	5.888.266.434,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.785.197.783,26	7.800.812.783,26	15.615.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	23.370.000,00	23.370.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.719.912.298,00	22.219.912.298,00	500.000.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	511.730.000,00	511.730.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.744.518.050,00	3.759.456.050,00	14.938.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.496.086.652,00	2.497.936.652,00	1.850.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.664.835.313,74	16.628.819.873,74	-36.015.440,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.506.770.906,00	3.510.102.214,00	3.331.308,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.393.216.047,93	4.409.995.187,93	16.779.140,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	421.423.588,00	421.423.588,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.604.755,00	25.629.755,00	2.025.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.671.393,50	5.771.393,50	100.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.334.368.837,00	25.338.590.533,00	4.221.696,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.743.224.438,27	2.744.579.878,27	1.355.440,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	601.026.418,00	601.026.418,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	408.208.123,00	408.208.123,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.110.544.619,00	4.110.544.619,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	407.334.744,73	407.334.744,73	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.000.710.414,00	1.000.710.414,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.886.233.000,00	1.886.233.000,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	145.565.208.139,00	145.543.346.443,00	-21.861.696,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.306.485.380,00	5.306.485.380,00	0,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	321.005.482,00	321.005.482,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.576.587.314,00	1.576.587.314,00	0,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	333.963.771,00	333.963.771,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	105.841.428,00	105.841.428,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	34.759.427.436,00	34.737.565.740,00	-21.861.696,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	675.000,00	675.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.238.416.507,00	1.238.416.507,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	598.663.616,00	598.663.616,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	922.500.000,00	922.500.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	664.453.205,00	664.453.205,00	0,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	88.190.000,00	88.190.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	94.638.908.000,00	94.638.908.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.449.966.000,00	3.449.966.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	397.500.000,00	397.500.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.593.505.000,00	18.593.505.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00	124.920.600,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.220.800,00	162.220.800,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76.260.000,00	76.260.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.096.400,00	119.096.400,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	23.202.900,00	23.202.900,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	60.000,00	60.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	15.763.800,00	15.763.800,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.876.000.000,00	3.876.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	47.670.000,00	47.670.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	300.518.594,00	300.518.594,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	73.349.217,00	73.349.217,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.844.255,00	8.844.255,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.072.000,00	9.072.000,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	20.252.162,00	20.252.162,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	300.000,00	300.000,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00	6.420.960,00	0,00
5.1.01.05.12.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.710.968.340,00	419.200.798.747,00	-19.510.169.593,00
5.1.02.01	Belanja Barang	91.288.105.052,40	90.402.244.633,40	-885.860.419,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	825.141.573,00	825.141.573,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.914.020.450,00	1.965.229.916,00	51.209.466,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.390.107.025,00	1.556.763.698,00	166.656.673,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.338.446.500,00	1.390.734.000,00	52.287.500,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	2.987.742.500,00	2.659.942.500,00	-327.800.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	256.492.750,00	256.492.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	153.192.800,00	153.192.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.901.968.793,60	8.102.839.833,60	200.871.040,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	2.500.500.000,00	2.294.000.000,00	-206.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.001.431.139,00	10.994.929.372,00	-6.501.767,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.900.356.090,00	1.903.141.090,00	2.785.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	208.360.000,00	208.860.000,00	500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.730.945.370,00	1.714.951.370,00	-15.994.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.203.026.227,00	2.209.148.227,00	6.122.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.616.039.320,00	1.624.739.311,00	8.699.991,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	197.768.000,00	187.768.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	683.857.500,00	610.000.000,00	-73.857.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	489.850.000,00	528.850.000,00	39.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	197.050.000,00	220.650.000,00	23.600.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.571.191.858,80	6.800.055.858,80	228.864.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	140.000.000,00	0,00	-140.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.781.532.000,00	15.175.682.000,00	394.150.000,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	728.272.000,00	647.072.000,00	-80.200.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.216.271.825,00	724.074.603,00	-492.197.222,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	375.638.350,00	375.638.350,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.011.981.664,00	15.271.984.064,00	260.002.400,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.350.962.600,00	4.325.912.600,00	-25.050.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	203.906.217,00	203.906.217,00	0,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.596.987.000,00	2.596.987.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	396.240.000,00	396.240.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	742.500.000,00	247.500.000,00	-495.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	922.665.000,00	938.715.000,00	16.080.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.000.000,00	57.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	469.920.000,00	223.800.000,00	-246.120.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	70.105.000,00	43.687.000,00	-26.418.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	414.070.000,00	269.430.000,00	-144.640.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	753.249.000,00	776.589.000,00	23.340.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.500.000,00	23.500.000,00	-11.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	193.856.500,00	75.606.500,00	-118.250.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	336.920.000,00	336.920.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	300.000.000,00	309.600.000,00	9.600.000,00
5.1.02.01.04.0065	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0086	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	209.837.879.383,00	205.680.936.583,00	-4.156.942.800,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	927.000.000,00	927.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.477.100.000,00	4.721.950.000,00	244.850.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.410.049.500,00	9.797.909.500,00	-2.612.140.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	181.800.000,00	181.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	152.200.000,00	148.350.000,00	-3.850.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	49.500.000,00	34.000.000,00	-15.500.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	971.800.000,00	772.500.000,00	-199.300.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	379.200.000,00	379.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.497.600.000,00	5.472.000.000,00	-5.025.600.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	37.601.451.800,00	37.601.451.800,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	146.782.500,00	165.760.500,00	18.978.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	897.600.000,00	637.500.000,00	-260.100.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.809.900.000,00	1.992.650.000,00	182.750.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.925.400.000,00	562.800.000,00	-1.362.600.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	318.900.000,00	273.000.000,00	-45.900.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	665.100.000,00	660.300.000,00	-4.800.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	125.530.000,00	923.530.000,00	798.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	82.500.000,00	91.650.000,00	9.150.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.974.000.000,00	6.300.600.000,00	-19.673.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	213.600.000,00	146.400.000,00	-67.200.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.234.231.468,00	9.913.231.468,00	-321.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.549.960.000,00	3.003.760.000,00	-546.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	601.800.000,00	627.700.000,00	25.900.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	5.362.250.000,00	4.529.000.000,00	-833.250.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	256.100.000,00	256.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	90.300.000,00	98.100.000,00	7.800.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	962.100.000,00	939.600.000,00	-22.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	15.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	120.625.000,00	120.625.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	549.640.000,00	582.520.000,00	32.880.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	268.600.000,00	245.200.000,00	-23.400.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22.669.522.000,00	20.035.487.000,00	-2.634.035.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	247.200.000,00	114.000.000,00	-133.200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.251.894.690,00	1.250.934.690,00	-960.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.141.731.074,00	7.244.571.274,00	102.840.200,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Juma/Surat Kabar/Majalah	329.044.000,00	328.724.000,00	-320.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.309.984.950,00	3.258.934.950,00	-51.050.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	224.447.500,00	224.447.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	37.502.924.401,00	37.502.924.401,00	0,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.638.580.000,00	4.638.480.000,00	-100.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.013.200.000,00	1.011.840.000,00	-1.360.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	0,00	5.025.600.000,00	5.025.600.000,00
5.1.02.02.01.0085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	0,00	3.970.800.000,00	3.970.800.000,00
5.1.02.02.01.0086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	0,00	4.169.400.000,00	4.169.400.000,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	0,00	694.800.000,00	694.800.000,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator iayanan operasional	0,00	5.040.300.000,00	5.040.300.000,00
5.1.02.02.01.0089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	0,00	1.252.600.000,00	1.252.600.000,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	0,00	7.742.400.000,00	7.742.400.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	292.800.000,00	292.800.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	189.600.000,00	205.800.000,00	16.200.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	95.000.000,00	91.000.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.02.04.0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	185.420.000,00	198.920.000,00	13.500.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.263.469.500,00	2.377.519.500,00	114.050.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.402.435.000,00	1.468.635.000,00	66.200.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	124.000.000,00	136.000.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	855.050.000,00	755.050.000,00	-100.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.849.296.000,00	1.852.496.000,00	3.200.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.529.000.000,00	1.689.000.000,00	160.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	27.654.148.029,00	26.343.396.149,00	-1.310.751.880,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.380.935.610,00	14.380.935.610,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.863.440.000,00	2.863.440.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	153.320.000,00	153.320.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	174.700.000,00	174.700.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	24.800.000,00	22.960.000,00	-1.840.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	608.350.000,00	636.850.000,00	28.500.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	335.575.363,00	335.575.363,00	0,00
5.1.02.03.02.0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	297.590.000,00	297.590.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.087.200.000,00	1.076.250.000,00	-10.950.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	470.978.920,00	465.458.920,00	-5.520.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	218.000.000,00	208.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.102.687.780,00	3.920.805.480,00	-181.882.300,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.238.500.000,00	1.238.500.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	1.218.070.356,00	50.010.776,00	-1.168.059.580,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.599.606.775,60	41.402.792.281,60	-13.196.814.494,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.764.577.000,00	16.121.035.000,00	-7.643.542.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.605.149.294,00	9.853.209.800,00	-6.751.939.494,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.088.750.497,60	15.287.417.497,60	1.198.667.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41.129.984,00	41.129.984,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.088.565.200,00	10.128.765.200,00	40.200.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	485.700.000,00	504.900.000,00	19.200.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	155.250.000,00	155.250.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0014	Belanja Uang Meugang	9.411.500.000,00	9.432.500.000,00	21.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	36.115.200,00	36.115.200,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	38.117.639.900,00	38.117.639.900,00	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	37.192.639.900,00	37.192.639.900,00	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	925.000.000,00	925.000.000,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.125.024.000,00	7.125.024.000,00	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.125.024.000,00	7.125.024.000,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	445.000.000,00	445.000.000,00	0,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	445.000.000,00	0,00	-445.000.000,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	445.000.000,00	0,00	-445.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	445.000.000,00	445.000.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	445.000.000,00	445.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.713.378.714,00	47.829.810.314,00	-2.883.568.400,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.864.042.000,00	9.864.042.000,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.064.042.000,00	9.064.042.000,00	0,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.332.068.420,00	27.548.500.020,00	-2.783.568.400,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	298.313.000,00	298.313.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.870.000.000,00	1.800.000.000,00	-70.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.933.200.000,00	2.569.900.000,00	-363.300.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.740.000.000,00	5.380.000.000,00	-360.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	16.590.555.420,00	14.600.287.020,00	-1.990.268.400,00
1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	1.106.568.000,00	1.106.568.000,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.106.568.000,00	1.106.568.000,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	754.183.294,00	754.183.294,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	754.183.294,00	754.183.294,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.556.517.000,00	8.556.517.000,00	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.207.417.000,00	6.207.417.000,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.184.100.000,00	2.184.100.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.101.781.706,00	24.073.561.706,00	-28.220.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	24.101.781.706,00	24.073.561.706,00	-28.220.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.840.293.706,00	16.717.293.706,00	877.000.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	8.261.488.000,00	7.356.268.000,00	-905.220.000,00
5.2	BELANJA MODAL	123.510.001.956,00	113.606.043.949,00	-9.903.958.007,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.461.873.015,00	46.897.241.815,00	-564.631.200,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	9.500.000,00	14.500.000,00	5.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	9.500.000,00	14.500.000,00	5.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	11.405.000.000,00	11.405.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.105.000.000,00	8.105.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	57.006.000,00	57.006.000,00	0,00

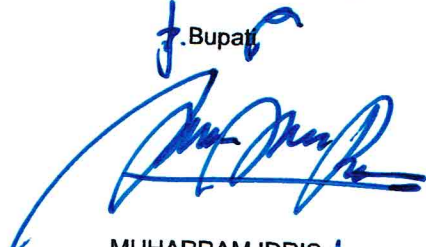
KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	57.006.000,00	57.006.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.834.916.882,00	8.497.921.682,00	-336.995.200,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	708.930.000,00	742.530.000,00	33.600.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	6.036.051.082,00	5.697.359.082,00	-338.692.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	35.960.000,00	35.960.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	660.163.600,00	660.163.600,00	0,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	8.000.000,00	3.000.000,00	-5.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.159.932.200,00	1.138.029.000,00	-21.903.200,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	183.590.000,00	183.590.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.057.500.000,00	3.048.000.000,00	-9.500.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.987.500.000,00	2.978.000.000,00	-9.500.000,00
5.2.02.06.03.0041	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.667.263.003,00	10.679.627.003,00	12.364.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.346.590.492,00	7.358.954.492,00	12.364.000,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.354.172.000,00	1.354.172.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	1.547.700.511,00	1.547.700.511,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	418.800.000,00	418.800.000,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	393.990.000,00	393.990.000,00	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	203.990.000,00	203.990.000,00	0,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.083.227.600,00	4.847.727.600,00	-235.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.940.905.900,00	3.812.905.900,00	-128.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.052.321.700,00	944.821.700,00	-107.500.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	207.083.430,00	207.083.430,00	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	203.850.000,00	203.850.000,00	0,00
5.2.02.18.03.0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	3.233.430,00	3.233.430,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	7.716.386.100,00	7.716.386.100,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	7.716.386.100,00	7.716.386.100,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.968.123.538,00	42.910.595.757,00	-57.527.781,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.806.653.538,00	41.749.125.757,00	-57.527.781,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.104.856.020,00	8.497.281.693,00	-607.574.327,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	136.851.000,00	136.851.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	25.797.359.257,00	25.797.359.257,00	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	228.755.340,00	226.485.340,00	-2.270.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.699.430.000,00	3.251.746.546,00	552.316.546,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	78.722.318,00	78.722.318,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	130.680.000,00	130.680.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	99.999.603,00	99.999.603,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.161.470.000,00	1.161.470.000,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.161.470.000,00	1.161.470.000,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.474.913.403,00	23.203.114.377,00	-9.271.799.026,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	23.151.360.745,00	19.096.802.377,00	-4.054.558.368,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	19.018.699.045,00	16.613.787.377,00	-2.404.911.668,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.132.661.700,00	2.483.015.000,00	-1.649.646.700,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.568.552.658,00	2.351.312.000,00	-5.217.240.658,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.568.552.658,00	2.351.312.000,00	-5.217.240.658,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	0,00
5.2.04.03.03.0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	605.092.000,00	595.092.000,00	-10.000.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	565.092.000,00	555.092.000,00	-10.000.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	289.092.000,00	289.092.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	30.000.000,00	24.800.000,00	-5.200.000,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	30.000.000,00	25.200.000,00	-4.800.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	551.178.114.568,00	551.178.114.568,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.562.393.233,00	15.562.393.233,00	0,00
4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	12.689.560.255,00	12.689.560.255,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.689.560.255,00	12.689.560.255,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.872.832.978,00	2.872.832.978,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.872.832.978,00	2.872.832.978,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	535.615.721.335,00	535.615.721.335,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	535.615.721.335,00	535.615.721.335,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	422.529.527.000,00	422.529.527.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	113.086.194.335,00	113.086.194.335,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.854.294.196.100,00	1.821.968.280.100,00	-32.325.916.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-24.000.000.000,00	-24.000.000.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Pembiayaan Netto	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Aceh Besar, 25 Maret 2025

f. Bupati

MUHARRAM IDRIS